KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO BARANG MILIK NEGARA**	**NOMOR SOP**	**SEK-OT.02.02-135**
	TANGGAL PEMBUATAN	**11 DESEMBER 2025**
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	**11 MARET 2026**
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**   **NICO AFINTA**
	NAMA SOP	**MONITORING DAN EVALUASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/ PMK.05/2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 402) 10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 11. Pedoman Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Hukum Nomor M.HH-23.OT.02.02 Tahun 2024 12. Petunjuk Pelaksanaan Teknis Implementasi Modul Komitmen, Persediaan, Aset Tetap, Piutang, dan General Ledger dan Pelaporan Pada Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK-1.PB.04.06 Tahun 2022	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms. Excel 2. Memahami tugas dan fungsi Pengelolaan BMN 3. Menguasai penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan BMN (SIP-BMN)
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian 2 SOP Pemantauan BMN 3 SOP Penertiban BMN	Alat Pengolah Data: a. Laptop/Komputer b. Jaringan Internet c. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Monitoring dan Evaluasi merupakan bahan penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Formulir C, oleh karena itu SOP ini harus dilaksanakan sehingga pelaporan Wasdal BMN dapat tersusun secara tepat waktu.	Pencatatan didokumentasikan dengan tertib secara manual serta disimpan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Kuasa Pengguna Barang	Pengguna Barang (PB)/Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (PPB-E1)/Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (PPB-W)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan penyampaian atas: 1. Laporan Hasil Inventarisasi 2. Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	MULAI		1. Laporan Hasil Inventarisasi 2. Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN			
2	1. PB/PPB-E1/PPB-W menelaah hasil pemantauan dan penertiban BMN yang dilaksanakan oleh KPB 2. PB/PPB-E1/PPB-W melakukan verifikasi data pemantauan dan penertiban BMN 3. PB/PPB-E1/PPB-W melakukan peninjauan lapangan terhadap kesesuaian antara data dan kondisi di lapangan 4. Menyusun Laporan dan BA Monitoring dan Evaluasi 5. Menyampaikan surat rekomendasi atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kepada KPB			1. Laporan Hasil Inventarisasi 2. Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN 3. SK Tim Monitoring Evaluasi	14 hari	Laporan dan BA Monitoring dan Evaluasi dan Surat Rekomendasi atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PB/PPB-E1/PPB-W	Tim berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang beranggotakan pejabat dan/atau pegawai dari unit kerja yang membidangi kesekretariatan dan/atau BMN dan unit kerja yang membidangi kepatuhan internal
3	Menerima dan menindaklanjuti rekomendasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PB/PPB-E1/PPB-W	SELESAI		Surat Rekomendasi atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PB/PPB-E1/PPB-W	7 hari	Laporan Tindak Lanjut atas rekomendasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	